

## LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Rapat ke : 6 (enam) Tahun Sidang : 2015-2016

Masa Persidangan : IV

Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Komunikasi

dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Hukum dan HAM)/ke-3

Hari, Tanggal : Rabu, 20 April 2016

Pukul : 10.35 WIB Sifat Rapat : Terbuka

Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.

Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P.

Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Pembahasan Materi (DIM) RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008

tentang ITE (Melanjutkan Raker tanggal 13 April 2016)

Hadir : 1. ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI

2. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

3. Menteri Hukum dan HAM, diwakili Oleh Dirjen Peraturan Perundang-

Undangan (PP), Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

beserta jajarannya.

## I. PENDAHULUAN

- 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
- 2. Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah (Menkominfo dan Menkumham) pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.

## II. KESIMPULAN

- Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahan DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hasil konsolidasi Tim Sekretariat Pemerintahdan Tim Sekretariat Komisi I DPR RI sebagaimana penugasan Raker Komisi I DPR RI dan Pemerintah tanggal 13 April 2016, yang berjumlah 57 DIM yang terdiridari:
  - a. 12 DIM "TETAP"
  - b. 33 DIM "SUBSTANSI"
  - c. 12 DIM "REDAKSIONAL"
- 2. Terkait dengan adanya perubahan penomoran pada DIM hasil konsolidasi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah memutuskan kembali menyetujui:
  - a. 12 DIM "TETAP", yaitu DIM Nomor 1,2,3,6, 10,11,15,21,43,49,55, dan 56 sebagaimana terlampir.
  - b. DIM Nomor 4 dengan "Penyempurnaan Rumusan" sebagaimana terlampir.
- 3. Komisi I DPR RI dan Pemerintah memutuskan menugaskan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk membahas12 DIM "REDAKSIONAL", yaitu DIM Nomor 8,9,12,14,20,25,26,33,36,42,53, dan 54.
- 4. Komisi I DPR RI dan Pemerintah memutuskan memutuskan menugaskan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas 32 DIM "SUBSTANSI", yaitu DIM Nomor 5, 7, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, dan 57.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB.

Jakarta, 20 April 2016 **KETUA RAPAT**,

TTD

Dr. TB. HASANUDDIN, SE, MM A-165